

### BAB III

#### STRATEGI ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION DALAM UPAYA MEMBERANTAS PRAKTIK “SAIKO” DI GHANA

Konsep *Transnational Advocacy Network* atau TAN yang diusung oleh Keck dan Sikkink (1998) digunakan dalam upaya menjawab rumusan masalah penelitian terkait peran Environmental Justice Foundation (EJF) dalam upaya menghentikan maraknya praktik “Saiko” di Ghana. Dalam penelitian ini, konsep TAN dipilih untuk membantu menjelaskan kanal-kanal interaksi yang dibangun oleh para aktor non-negara dalam kerangka kerjasama Utara-Selatan. Advokasi<sup>1</sup> yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam TAN juga memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh dalam dinamika politik nasional maupun internasional. Seperangkat analisis yang disediakan dalam konsep TAN dapat membantu menjelaskan bentuk-bentuk strategi atau taktik yang digunakan oleh aktor non-negara dalam mengadvokasikan isu-isu global. Strategi yang dimaksud dalam konsep TAN dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori meliputi: politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas.

Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa subbab, guna menjelaskan dengan lengkap dan mendalam terkait peran EJF dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana. Subbab pertama dalam bab ini akan

---

<sup>1</sup> Menurut Keck dan Sikkink (1999), jaringan advokasi transnasional terbentuk dari adanya jaringan sosial karena terdiri atas aktor-aktor yang memiliki pengetahuan yang mendalam serta keahlian terkait suatu isu yang kemudian melakukan kegiatan membela perkara, masalah pihak lain, memihak kepada seseorang, atau mempertahankan nilai-nilai tertentu (advokasi). Adanya kata “transnasional” pada konsep tersebut menunjukkan jaringan yang terbentuk melakukan aksinya dengan melewati batasan negara dan isu yang diperjuangkan merupakan isu yang berskala global.

membahas tentang EJF sebagai aktor non-negara dalam jaringan advokasi transnasional yang terbentuk. Kemudian, subbab kedua akan memberikan penjelasan tentang upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana melalui kerangka *boomerang pattern* dalam konsep TAN. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci terkait bentuk taktik EJF dalam mengadvokasikan kasus praktik Saiko di Ghana dengan menggunakan strategi politik dalam konsep TAN akan dijelaskan pada subbab ketiga. Subbab keempat akan memberikan penjelasan terkait beberapa strategi lain yang dilakukan EJF guna membantu upaya pemberantasan praktik Saiko pada ranah domestik Ghana. Terakhir, subbab kelima dalam bab ini akan menjelaskan tentang implikasi dari upaya advokasi EJF terhadap praktik Saiko dan sektor perikanan di Ghana secara keseluruhan.

### **3.1 Environmental Justice Foundation sebagai *Political Entrepreneurs***

Fenomena globalisasi telah memberikan bantuan kepada perkembangan ilmu hubungan internasional yang pada akhirnya melahirkan konsep baru yaitu transnasionalisme. Proliferasi teknologi pada bidang komunikasi, informasi, dan transformasi membantu transnasionalisme dalam melumatkan batas antarnegara dan segala sifat kaku (*rigid*) yang menjadi bagian integralnya (Parameswari dalam Soetjipto, 2018). Kemunculan transnasionalisme memberikan implikasi kepada hubungan internasional yang tidak lagi didominasi oleh aktor negara, tetapi berbagai aktor non-negara seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, pelaku bisnis, pasar, dan individu dengan pengaruh yang signifikan dalam ranah politik global. Selain itu, isu yang

ditekuni dalam hubungan internasional tidak lagi terbatas pada isu *high politics* yang berkuat dalam persoalan peperangan dan perdamaian, melainkan berkembang ke arah isu-isu *low politics* seperti isu hak asasi manusia, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.

Organisasi non-pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan salah satu aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam transnasionalisme. Menurut Spar dan Lamure (dalam Parameswari, 2018), NGO dapat diartikan sebagai organisasi non-pemerintah, non-profit, dan non-partisan yang bekerja secara independen dengan cara mengumpulkan serta memobilisasi informasi guna mengubah suatu hal. Para NGO cenderung memfokuskan kerjanya kepada isu-isu *low politics* melalui advokasi, yaitu upaya yang bersifat persuasif untuk mempengaruhi dilakukannya perubahan kebijakan oleh otoritas suatu negara. Maka dari itu, NGO kerap disebut sebagai *altruistic group* yang berarti kelompok sosial yang bertujuan untuk membantu kelompok lainnya, terutama kaum marjinal, untuk mewujudkan kesejahteraan atas dasar sukarela atau tidak mengharapkan imbalan (Ritov & Kogut, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka organisasi Environmental Justice Foundation (EJF) dapat diklasifikasikan sebagai NGO yang berfokus pada advokasi isu-isu *low politics*, terutama isu lingkungan dan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari visi EJF yaitu "*Protecting People and Planet*" yang mengaitkan lingkungan dengan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan prinsip

fundamental yang dianut oleh EJF, yaitu “*fair treatment and meaningful involvement of all people ... with respect to the development, implementation, and enforcement of environmental laws, regulations, and policies*”. Dalam film dokumenter karya EJF yang berjudul *Who We Are*, EJF (2008) menyebutkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan tidak terbatas pada kualitas hidup, tetapi juga persoalan tentang hidup dan mati. Fokus dari EJF juga kembali ditegaskan dalam pernyataan resminya yang menyatakan bahwa “*environmental security is not just about quality of life, it is a basic human right*” (EJF, 2015c).

Berdasarkan prinsip fundamental dan visinya, EJF meyakini bahwa setiap orang tanpa memandang status kebangsaan, ras, status, sosio-ekonomi, dan lain sebagainya memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara atas pelaksanaan dan pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan ruang hidup mereka (McIntosh & Pontius, 2016). Selain itu, EJF juga memberikan penegasan akan hak-hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman dan layak, tanpa adanya paksaan dalam melaksanakan tugas, serta terbebas dari bahaya lingkungan kerjanya (Ramirez-Andreotta, 2019). Oleh karena itu, dalam advokasinya EJF menuntut negara untuk selalu mendasarkan pembuatan dan pelaksanaan kebijakannya pada klausul-klausul yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), serta *International*

*Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* terkait segala kebijakan yang berkaitan dengan distribusi hak atas ruang hidup.

Dalam menjalani kegiatan advokasinya, EJF mengkategorikan isu ke dalam empat fokus utama yaitu *oceans*, *climate*, *cotton*, dan *forests*. Fokus advokasi pertama, *oceans*, dilakukan untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dan tidak berkelanjutan, memberantas pelanggaran hak asasi manusia yang didorong oleh kegiatan yang melanggar hukum, serta melindungi komunitas pesisir dan satwa liar berharga. Selanjutnya, fokus advokasi kedua, *climate*, ditujukan untuk mengamankan tindakan internasional dalam upaya mendekarbonisasi ekonomi di seluruh dunia, melindungi alam sebagai penyimpan karbon yang vital, dan memastikan keadilan iklim untuk semua. Kemudian, fokus advokasi ketiga, *cotton*, dilakukan untuk mengupayakan pengurangan efek negatif dari produksi kapas yang berimbas kepada kehidupan manusia dan lingkungan, mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan pestisida, kekurangan air, serta menyerukan transparansi rantai pasokan kapas. Terakhir, fokus advokasi keempat, *forests*, yang dilakukan EJF berkaitan erat dengan upaya memerangi krisis iklim dan melindungi satwa liar yang hidup di hutan (EJF, n.d.-c).

Topik penelitian yang membahas tentang upaya menghentikan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (*IUU fishing*) atau yang kerap dikenal dengan sebutan “Saiko” di Ghana dapat digolongkan ke dalam fokus advokasi pertama, yaitu *oceans*. Upaya

menjalankan visi advokasi yang dilakukan EJF dilangsungkan dengan menjadikan EJF sebagai bagian dari jaringan global dengan tujuan untuk mengakhiri praktik *IUU fishing*. Hal tersebut dilakukan oleh EJF melalui relasi yang dijalin dengan NGO domestik Hen Mpoano dan memanfaatkan media untuk mendapatkan perhatian dari organisasi internasional untuk pada akhirnya memberikan pengaruh kepada pemerintah Ghana. Jaringan global tersebut dikenal dengan sebutan *Transnational Advocacy Network* (TAN).

Konsep TAN dikembangkan oleh Keck dan Sikkink melalui buku "*Activists Beyond Border*" yang diterbitkan pada tahun 1998. Dalam buku tersebut, TAN dapat didefinisikan sebagai kumpulan aktor yang terikat oleh kesamaan nilai, norma, dan diskursus serta saling bertukar informasi dan sumber daya lainnya untuk bekerja melampaui batas-batas negara dalam mengadvokasikan suatu isu global. Menurut Keck & Sikkink (1998), munculnya TAN didorong oleh pengaruh dari konteks politik negara target karena adanya limitasi atau *blockage* ketika suatu negara membatasi sebuah gerakan yang menuntut suatu perubahan. Gerakan tersebut akan kemudian mencari cara untuk menyampaikan tuntutananya dengan menjalin relasi dengan aktor-aktor lain yang tergabung dalam masyarakat sipil global seperti media dan/atau NGO internasional. Selain itu, suatu gerakan juga dapat memanfaatkan kemampuan melobinya kepada negara lain atau organisasi internasional ketika suatu gerakan menghadapi benturan dengan otoritas negara sebagai alternatif lain dalam

upaya menyampaikan tuntutan. Interaksi yang terjalin dalam kondisi tersebut kemudian memunculkan suatu fenomena yang sering dikenal dengan sebutan *boomerang pattern*.

### **3.2 *Boomerang Pattern* dalam Upaya Memberantas Praktik “Saiko”**

Dalam upaya menghentikan praktik “Saiko” di Ghana, *boomerang pattern* yang terbentuk sebagai akibat dari adanya interaksi transnasional diawali dengan advokasi yang dilakukan oleh NGO domestik bernama Hen Mpoano. Organisasi tersebut secara legal terdaftar di Ghana sejak tahun 2013 lalu dan berbasis di Takoradi. Hen Mpoano memiliki visi untuk mewujudkan manajemen pesisir dan ekosistem perairan Ghana yang inklusif dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut, Hen Mpoano membantu memberikan dukungan teknis, penyuluhan, dan kebijakan kepada masyarakat pesisir, kelompok masyarakat sipil, para otoritas tradisional, lembaga pemerintah, serta sektor swasta dalam upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*), penelitian, perluasan jaringan, dan pengembangan proyek di bidang perikanan serta tata kelola ekosistem pesisir (Hen Mpoano, n.d.-a). Pada rentang tahun 2013 sampai dengan 2021 lalu, Hen Mpoano telah berhasil membantu kurang lebih 116 komunitas di Ghana melalui 20 proyek yang telah terimplementasi dan masih berlangsung hingga saat ini. Dari pelaksanaan proyek-proyek tersebut, Hen Mpoano telah berhasil membantu sebanyak 2.234 orang melalui proyek pengembangan mata

pencaharian, 947 orang memperoleh akses kepada perawatan kesehatan reproduksi, 1.050 desa penerima manfaat koperasi dan simpan pinjam, dan penanaman kurang lebih 99.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Ghana (Hen Mpoano, n.d.-b).

EJF sebagai sebuah organisasi yang bergerak mengadvokasi bidang HAM dan lingkungan kemudian menjalin kerjasama dengan Hen Mpoano dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana. Hal tersebut dilakukan EJF karena adanya kesadaran bagi pentingnya sektor perikanan bagi kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Ghana, terutama penduduk yang termasuk dalam komunitas pesisir yang bergantung pada sektor perikanan untuk asupan pangan, mata pencaharian, dan pendapatan mereka. Relasi antara EJF dan Hen Mpoano pun dibuktikan dengan pernyataan pada situs web EJF yang berbunyi sebagai berikut.

*“EJF is working with local partner Hen Mpoano to improve the lives of fishers and promote food security across Ghana”* (EJF, n.d.-a) .

Guna menghentikan praktik Saiko di Ghana, EJF dan Hen Mpoano membentuk sebuah proyek tiga tahun bernama *Far Dwuma Nkɔdo* yang bertujuan untuk mempromosikan ketahanan pangan dan meningkatkan mata pencaharian bagi para nelayan Ghana, mengurangi kegiatan penangkapan ikan ilegal (*IUU fishing*), dan mempromosikan pengelolaan bersama sektor perikanan yang partisipatif. Urgensi dari implementasi *Far Dwuma Nkɔdo* pun disampaikan oleh direktur eksekutif EJF, Steve Trent, sebagai berikut.

*“Ghana’s fishing sector is crucial to the country’s economic prosperity and the well-being of millions of its citizens – particularly those living in coastal communities who rely on it for their food, livelihood, and income. We welcome the moves made by the Ghanaian Government to tackle the unsustainable and illegal fishing practices that have, for too long, plagues the sector. But vital to their success will be inclusion of local fishing communities; ensuring they have a seat at the table and that they are willing and able to take co-responsibility for the management of the fishing resources that they depend on” (EJF, 2017).*

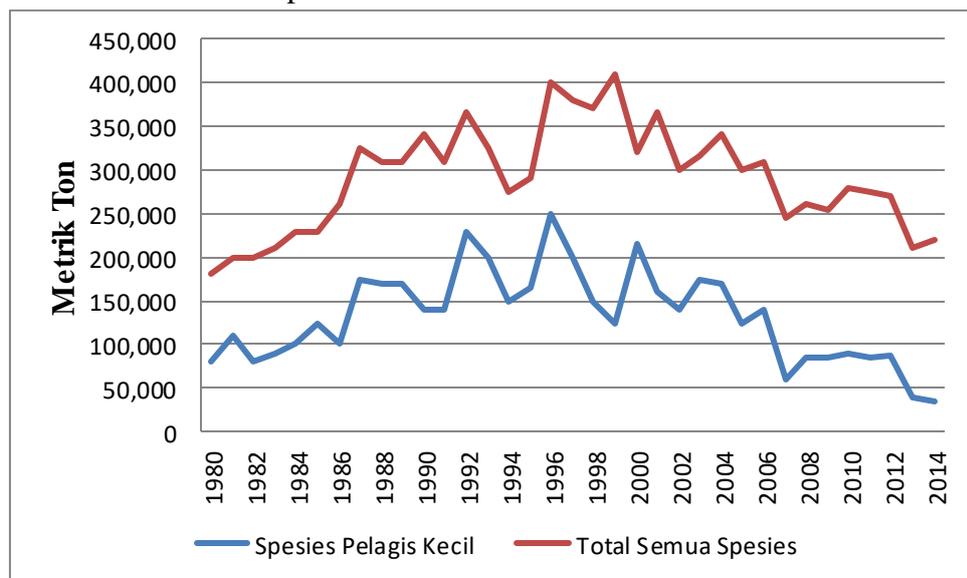
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh direktur Kofi Agbogah sebagai direktur dari Hen Mpoano pada tahun 2017 lalu sebagai berikut.

*“Fishing provides livelihoods for millions of Ghanaians, including countless local coastal communities. It is important that we empower these communities and ensure their voice is heard as artisanal fishers have a vital role to play if we want to retain the sustainability in the fishing sector. We need to secure these communities’ tenure rights, and ring fence their traditional fishing activities against external aggressions such as urbanisation or other economic activities” (EJF, 2017).*

Sebagai bentuk tindak lanjut dari hubungan kerjasama yang dijalin antara EJF dengan Hen Mpoano dalam kerangka *Far Dwuma Nkodo*, kerjasama pertama yang dilakukan oleh kedua organisasi adalah mengadakan investigasi dan mempublikasikan hasil laporan berjudul *“The Problem with “Saiko”, an Ecological and Human Catastrophe”* yang dipublikasikan pada Juni 2018. Dalam laporan tersebut, EJF dan Hen Mpoano memberikan penjelasan terkait perkembangan praktik Saiko dari menjadi sebuah sistem pertukaran atas tangkapan yang tidak diinginkan dengan makanan menjadi industri terorganisir yang ilegal, lukratif, dan tidak hanya terbatas pada pertukaran tangkapan yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam laporan tersebut diungkapkan pula bagaimana Saiko

menyebabkan stok ikan Ghana yang menurun dan memberikan kekhawatiran yang besar terhadap status perikanan pelagis kecil (dapat dilihat pada Grafik 3.1). Laporan tersebut menyebutkan bahwa Saiko secara efektif “mencuri” sumber daya perikanan dari nelayan artisanal, membanjiri pasar dengan harga murah, mengurangi jumlah ikan yang berkualitas, dan menekan pendapatan para nelayan artisanal (EJF & Hen Mpoano, 2018d).

**Grafik 3.1** Jumlah Pendaratan Ikan Pelagis Kecil dan Total Seluruh Spesies di Ghana tahun 1980-2014



Sumber: Lazar et al. (2016)

Kemudian, bersamaan dengan peringatan pertama Hari Internasional untuk Memerangi Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diregulasi (*IUU fishing*), EJF mempublikasikan sebuah film dokumenter berjudul “*Ghana: A Fishing Nation in Crisis*” menunjukkan bagaimana industri perikanan Ghana yang beberapa tahun terakhir telah diganggu oleh kegiatan ilegal yang juga memicu bencana

ekologi dan bencana lainnya yang disebabkan oleh aktifitas manusia (*ecological and human catastrophe*). Praktik Saiko yang merusak dan eksploitatif telah mendorong nelayan lokal untuk beralih kepada metode penangkapan ikan ilegal yang menggunakan bahan peledak, bahan kimia, dan alat perusak lainnya. Hal ini disebabkan karena jika mereka tetap menggunakan metode legal, maka mereka akan mengalami penurunan pendapatan. Praktik Saiko yang dilakukan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan manusia (EJF, 2019b).

Dari serangkaian investigasi dan publikasi laporan yang dilakukan oleh EJF bersama dengan Hen Mpoano, Steve Trent selaku direktur eksekutif dari organisasi tersebut mengatakan bahwa *“the implications of the imminent collapse of Ghana’s small pelagic fishery cannot be overstated. Over 2 million people in Ghana rely on fisheries for their livelihoods, with limited alternative sources of income or employment. Should the resource disappear, mass migration and social upheaval can be considered a very real prospect”* (EJF & Hen Mpoano, 2018a). Pernyataan tersebut ditujukan kepada pemerintah Ghana yang hingga saat ini masih belum mampu menghentikan praktik Saiko di negaranya. Oleh karena itu, advokasi yang dilancarkan oleh EJF dan Hen Mpoano dalam kerangka *Far Dwuma Nkodo* menasar pada negara-negara pengimpor hasil laut Ghana, terutama negara-negara Uni Eropa dan Inggris yang menjadi tujuan ekspor utama hasil laut Ghana (EJF, 2020b). Alasan bagi

Hen Mpoano untuk menjalin hubungan kerjasama dengan EJF adalah karena adanya suatu kondisi yang diistilahkan sebagai limitasi atau *blockage*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *blockage* dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang terjadi ketika NGO domestik tidak memiliki akses kepada pemerintah sebagai akibat dari adanya hambatan secara struktural maupun institusional. Limitasi tersebut kerap terjadi di negara-negara yang kurang demokratis. Dikatakan demikian, karena aspirasi masyarakat seringkali ‘dikerdilkan’ dalam negara yang kurang demokratis (Keck & Sikkink dalam Bloodgood & Clough, 2017). Selain itu, pelanggaran HAM secara masif justru sering dilakukan oleh negara sehingga lembaga legislatif yang ada cenderung hanya berfungsi sebagai ‘tukang cap stempel’ pemerintah (Van Deth, 2009). Pada tahun 2021, berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Freedom House, Ghana yang meraih skor 80/100 dikategorikan sebagai negara *free* yang artinya termasuk dalam jajaran negara-negara demokratis (Freedom House, 2022). Namun, pada kenyataannya di tengah kondisi negara Ghana yang demokratis, masih terdapat tantangan tersendiri yang menghambat terbentuknya ruang kelompok advokasi lokal yang menyerukan hak-hak kelompok yang rentan dan marjinal.

Bukti *blockage* yang dilakukan oleh pemerintah Ghana dalam upaya advokasi praktik Saiko terlihat pada laporan EJF berjudul “*Stolen at Sea*” pada tahun 2019 yang memperlihatkan kontradiksi antara peraturan

yang berlaku dan pernyataan dari aparat yang berwenang dalam menghentikan praktik Saiko di Ghana. Pada Oktober 2018, Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa praktik Saiko yang dilakukan antara kapal pukat industri dengan sampan dapat dikatakan legal apabila dilakukan di bawah pengawasan. Sejak pengumuman tersebut diberikan pun praktik Saiko di Elmina kembali meningkat. Namun, pernyataan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pasal 33 Ayat 2 dalam Peraturan Perikanan 2010 yang secara khusus melarang praktik Saiko (EJF & Hen Mpoano, 2019d).

Selain itu, pemerintah Ghana malah nampak mendukung praktik Saiko dengan tidak melarang praktik tersebut terjadi melalui pernyataan dari Menteri Perikanan Elizabeth Afoley Quaye pada awal tahun 2020 lalu yang menyatakan *“there is a practice in this country called Saiko, it is not the intention of the NPP to spoil the ongoing business, there are rumours that the fisheries ministry has banned the practice but it is untrue ... we have not said you should stop Saiko, we are saying do it and do it well”* (Ghana News, 2020). Adanya hambatan bagi kelompok masyarakat domestik untuk mengadvokasikan isu yang penting kepada pemerintah kemudian mendorong Hen Mpoano, organisasi domestik yang bergerak untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut Ghana yang inklusif dan terintegrasi, untuk menekan pemerintah Ghana sebagai aktor target advokasi dengan bantuan dari EJF sebagai kekuatan dari luar yang dianggap mampu memberikan pengaruh.

Pola hubungan yang terbentuk dalam jaringan advokasi transnasional seringkali melibatkan NGO di negara berkembang yang sistem pemerintahannya cenderung kurang demokratis dan NGO di negara maju dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Hubungan tersebut terjalin dengan adanya asumsi bahwa NGO di negara maju yang demokratis memiliki 'ruang' untuk advokasi isu-isu sensitif. Selain itu, sumber daya lebih besar yang dimiliki NGO di negara maju (EJF) dari sisi jaringan, pengaruh, akses informasi, pendanaan, serta keahlian dipercaya dapat dimanfaatkan dalam jalinan kontak internasional dan membantu memperkuat tuntutan NGO domestik (Hen Mpoano). Oleh karena itu, jaringan advokasi transnasional yang dijalin diharap dapat membantu advokasi dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana dengan membuka ruang bagi isu tersebut agar mendapatkan perhatian pada ranah dunia internasional sehingga tuntutan dari Hen Mpoano dapat kembali digemakan ke ranah domestik yaitu di Ghana.

Dalam upaya mengadvokasikan praktik Saiko di Ghana pada ranah global, EJF mempublikasikan sejumlah laporan investigasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Laporan pertama berjudul "*The Problem with 'Saiko', An Ecological and Human Catastrophe*" yang dipublikasikan pada tahun 2018 membahas perkembangan praktik Saiko yang berawal sebagai sebuah bentuk sistem pertukaran informal hasil tangkapan yang tidak diinginkan dengan bahan baku, makanan, atau buah-buahan bagi para nelayan untuk bertahan hidup di laut menjadi industri terorganisir

yang ilegal. Laporan tersebut juga menjabarkan dampak buruk yang diberikan dari Saiko terhadap sektor perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018d). Selanjutnya, pada tahun 2019 EJF mempublikasikan laporan dengan judul “*Securing Equitable and Sustainable Fisheries: The Case for Greater Transparency in the Management and Governance of Ghana’s Fisheries Sector*” yang berisi informasi terkait lisensi dan otorisasi kegiatan perikanan, pelacakan riwayat dan aktifitas kapal pukat, status implementasi perencanaan pengelolaan perikanan, dan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Ghana terkait transparansi pada sektor perikanan Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2019b).

Di tahun 2019 juga, EJF mempublikasikan laporan berjudul “*Stolen at Sea*” yang menyorot praktik Saiko dalam skala besar dan dampaknya terhadap sektor perikanan Ghana. Pada laporan ini mengungkap Saiko yang dimanfaatkan sebagai disinsentif<sup>2</sup> bagi kapal pukat atas tangkapan sampingan mereka dan lebih mendorong penargetan spesies dengan permintaan tinggi untuk konsumsi lokal (EJF & Hen Mpoano, 2019d). Kemudian pada tahun 2020, EJF mempublikasikan 2 (dua) laporan sekaligus. Laporan pertama berjudul “*The “People’s” Fishery on the Brink of Collapse: Small Pelagics in Landings of Ghana’s Industrial Trawl Fleet*” mengungkap fakta bahwa kapal pukat yang mengambil

---

<sup>2</sup> Disinsentif dapat diartikan sebagai upaya mengurangi, membatasi, atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana awal.

sebagian besar stok ikan sardinella<sup>3</sup> remaja dalam praktik Saiko merupakan faktor utama yang menyebabkan runtuhnya perikanan pelagis kecil di Ghana. Dapat dikatakan demikian karena ikan sardinella merupakan komoditi utama dari komunitas nelayan sehingga diharapkan dan seharusnya dapat melanjutkan siklus reproduksi dan mengisi kembali stok perikanan di laut Ghana (EJF, 2019f). Laporan kedua yang berjudul “*Europe – A Market for Illegal Seafood from West Africa: The Case of Ghana’s Industrial Trawl Sector*” membahas tentang hubungan antara pasar hasil laut Eropa dengan praktik Saiko di Ghana. Dalam laporan ini diperlihatkan bukti ilegalitas sistemik dan meluas pada sektor industri kapal pukat yang kurang transparan dan menghambat kemampuan Ghana untuk mengelola sektor perikanan secara berkelanjutan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum perikanan internasional (EJF, 2020b).

Kasus penangkapan ikan ilegal yang terjadi di Ghana pun turut diberitakan oleh media internasional seperti The Guardian, The Fish Site, dan The Maritime Executive. Dengan adanya pemberitaan oleh media-media internasional tersebut, maka secara tidak langsung hal tersebut membantu melaksanakan misi advokasi yang dilaksanakan oleh Hen Mpoano dan EJF. Pada tahun 2018, The Fish Site menjadi media internasional pertama yang mempublikasikan berita terkait praktik Saiko

---

<sup>3</sup> Ikan *Sardinella Aurita* (sardinella bulat) dan *Sardinella Maderensis* (sardinella datar) bersama dengan *Engraulis Encrasicolus* (ikan teri Eropa), dan *Scomber Colias* (makarel chub atlantik) merupakan komoditi utama dari komunitas nelayan Ghana yang kerap disebut dengan nama ‘*People’s Fish*’ (‘Ikan Rakyat’).

di Ghana. Dalam publikasinya, The Fish Site memberitakan tentang perilisian film dokumenter Hen Mpoano dan EJF yang mengungkap tingkat krisis dalam sektor perikanan Ghana, “*Ghana: A Fishing Nation in Crisis*”, dengan judul “*Film to Highlight Ghanaian Fish Transshipments*” (The Fish Site, 2018). Kurang lebih setahun kemudian yaitu pada Juni 2019, The Guardian mempublikasikan artikel berita berjudul “*Illegal Fishing by Foreign Trawlers Costs Ghana \$50 M a Year, Researchers Say*” yang memberitakan hasil temuan Hen Mpoano dan EJF terkait praktik Saiko yang membawa kerugian sebanyak kurang lebih 50 juta USD bagi sektor perikanan Ghana (The Guardian, 2019). Kate Hondal, jurnalis yang mempublikasikan tersebut, memiliki asosiasi dengan organisasi Humanity United<sup>4</sup>. Pemberitaan tentang praktik Saiko di Ghana juga dilakukan oleh media internasional The Maritime Executive dalam publikasinya yang berjudul “*Report: Ghana’s Sardinella Fishery Collapsing*” pada awal tahun 2020 lalu (The Maritime Executive, 2020).

Upaya advokasi yang dilaksanakan oleh EJF di bawah kerangka *Far Dwuma Nkodo*, ditambah dengan adanya pemberitaan dari sejumlah media internasional, berhasil mendorong para sasaran ekspor hasil laut (*seafood*) Ghana untuk mengeluarkan keputusan yang menunjukkan sikap kecaman terhadap praktik Saiko yang marak terjadi di Ghana. Sebanyak kurang lebih 70% hasil laut (tuna) Ghana diekspor kepada negara-negara

---

<sup>4</sup> Humanity United adalah sebuah yayasan asal Amerika Serikat yang didedikasikan untuk mengembangkan kebebasan dan perdamaian abadi. Dalam keberlangungannya, Humanity United merupakan organisasi yang menjadi salah satu pendonor EJF yang turut membantu EJF dalam upaya memerangi praktik perbudakan modern dalam rantai pasokan *seafood* global.

di Uni Eropa (dapat dilihat pada Tabel 3.1) dan 30% dari sisanya dikirim ke China dan Jepang, serta negara-negara tetangga seperti Pantai Gading, Liberia, dan Togo (FAO, 2016a). Namun, respon yang kemudian membuat pemerintah Ghana secara tegas berkomitmen untuk menghentikan praktik Saiko di Ghana datang dari Uni Eropa.

**Tabel 3.1** Impor Produk Perikanan Ghana oleh Negara-Negara Anggota Uni Eropa dan Britania Raya tahun 2018

<b>Negara</b>	<b>Jumlah (dalam ton)</b>	<b>Nilai (dalam juta Euro)</b>
Britania Raya	12.112	57.6
Perancis	7.86	40.5
Italia	3.875	18.8
Belanda	3.397	14.1
Jerman	3.006	10.9
Spanyol	1.374	5.1
Portugal	1.191	7.4
Negara EU Lainnya	759	3.0
<b>Total</b>	<b>33.574</b>	<b>157.3</b>

Sumber: Eurostat (2018)

Uni Eropa merupakan pasar utama bagi Ghana untuk memasarkan hasil lautnya. Hal tersebut terhitung dari sekitar 85% nilai ekspor hasil laut Ghana dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang diperlihatkan pada tabel di atas, pada tahun 2018 Uni Eropa mengimpor sekitar 33.574 ton hasil laut Ghana senilai €157.3 juta (Eurostat, 2018). Sebagian besar produk dari kegiatan impor mencakup produk tuna yang diproses maupun yang tidak diproses.

Berkaitan dengan upaya mengatasi praktik *IUU fishing* secara global serta mencegah impor produk perikanan yang ditangkap secara

ilegal ke pasar Uni Eropa, maka diberlakukan Regulasi Dewan (EC) No. 1005/2008 sejak Januari 2010 lalu (Council Regulation (EC) No. 1005, 2008). Regulasi tersebut mewajibkan operator untuk menunjukkan sertifikat tangkapan untuk impor hasil laut dari negara ketiga<sup>5</sup> ke dalam ranah Uni Eropa. Sertifikat tangkapan harus divalidasi oleh negara bendera kapal penangkap yang membuktikan bahwa hasil laut yang ditangkap sesuai dengan undang-undang dan tindakan pengelolaan yang relevan.

Dari sisi pengimpor, negara-negara anggota Uni Eropa diharuskan untuk memeriksa dan memverifikasi informasi dalam sertifikat tangkapan yang diterima berdasarkan resiko bahwa kiriman yang bersangkutan didapatkan dari kegiatan *IUU fishing*. Skema sertifikasi hasil tangkapan dilengkapi dengan prosedur mengidentifikasi negara ketiga sebagai negara yang tidak bekerja sama dalam upaya menghentikan praktik *IUU fishing* (*the 'carding' process*). Sebagai bagian dari proses tersebut, negara dapat diberikan kartu kuning sebagai bentuk peringatan atau diberikan kartu merah karena gagal memenuhi standar internasional dalam pengelolaan perikanan dan bekerjasama dalam menghentikan praktik *IUU fishing*. Sejak tanggal diberikannya kartu merah oleh Komisi Eropa kepada negara ketiga, impor produk yang ditangkap oleh kapal negara tersebut pun dilarang untuk dijual dalam pasar Uni Eropa (Council Regulation (EC) No. 1005, 2008).

---

<sup>5</sup> Maksud dari negara ketiga adalah negara-negara yang bukan merupakan negara anggota Uni Eropa.

Ghana menerima kartu kuning peringatannya berdasarkan Regulasi Dewan Uni Eropa pada November 2013 karena gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk menghentikan praktik *IUU fishing* dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan di dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya (European Commission, 2013). Secara spesifik, Keputusan Komisi Eropa untuk memberikan kartu kuning kepada Ghana didasarkan pada:

1. Kegagalan untuk menerapkan sanksi pencegah dalam Undang-Undang yang sehubungan dengan pelanggaran *IUU fishing*;
2. Kegagalan untuk mencegah pendaftaran kapal pelaku *IUU fishing* yang menggunakan bendera negaranya;
3. Kegagalan untuk mendeteksi pelanggaran berulang terhadap peraturan perikanan nasional dan internasional;
4. Kegagalan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pendaratan tangkapan hasil *IUU fishing* dan memasuki rantai pasokannya;
5. Terdapat pelanggaran berulang oleh kapal berbendera Ghana terhadap tindakan konservasi dan pengelolaan regional, termasuk larangan pengiriman barang di laut;
6. Terdapat tindakan yang tidak memadai untuk mengurangi jumlah kapal industri yang beroperasi di wilayah perairan Ghana yang sejalan dengan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS) serta kapasitas penegakan, dan;

7. Terdapat aktifitas penangkapan ikan secara berlebihan di kawasan yang dikelola oleh *The International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna* (ICCAT) dan kelebihan kapasitas dalam armada tuna berbendera Ghana (European Commission, 2013).

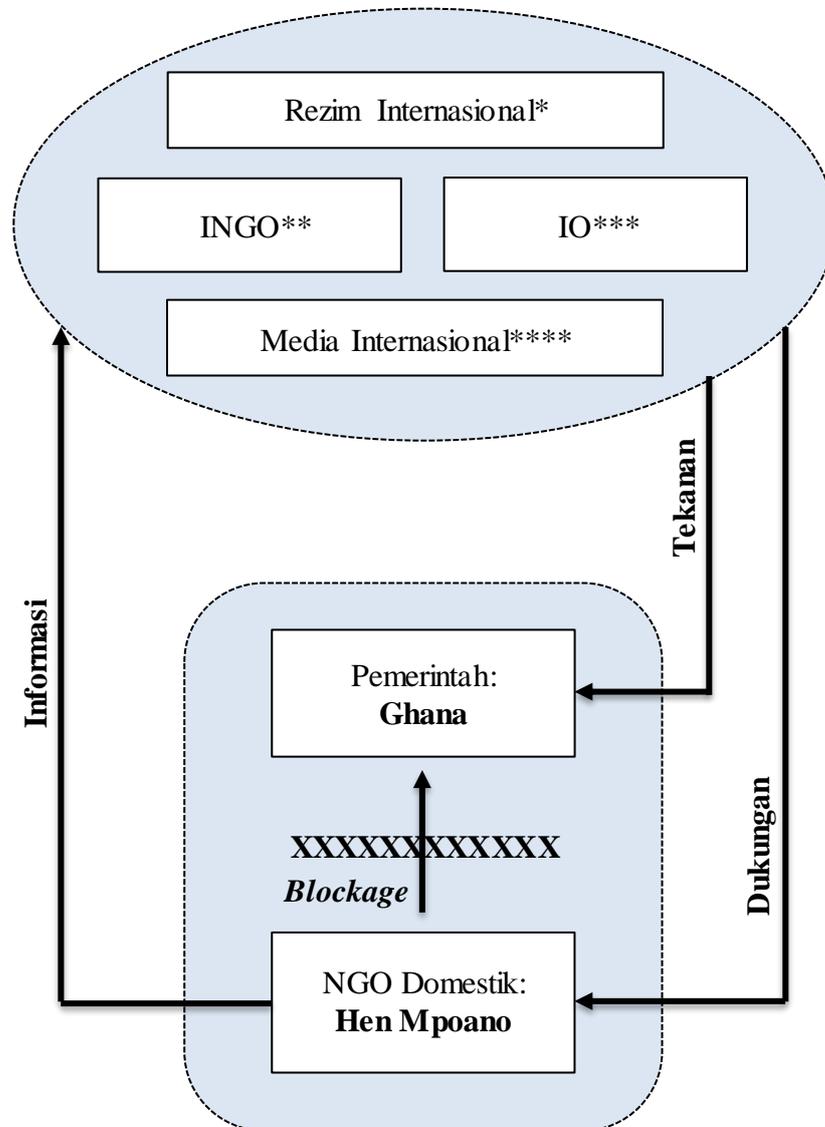
Pemberian kartu kuning oleh Komisi Eropa kepada Ghana berhasil mendorong diberlakukannya serangkaian perbaikan dalam manajemen perikanan dan MCS yang mengarah pada pencabutan kartu kuning pada Oktober 2015 (European Commission, 2015). Reformasi yang dilakukan antara lain mengadopsi undang-undang yang direvisi untuk memperkuat kerangka hukum dan memperkenalkan sanksi yang menghalangi mulai dari US\$1-4 juta (*Fisheries Act (Amendment) 880*, 2014; *The Fisheries Regulations (Amendment) (LI 2217)*, 2015); adopsi rencana pengelolaan perikanan untuk periode 2015-2019 yang menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi kapasitas dan upaya penangkapan di sektor perikanan industri dan artisanal (Republic of Ghana, 2015); adopsi Rencana Aksi Nasional (National Plan of Action / NPOA) untuk memerangi praktik *IUU fishing* (FAO, 2014b); pembentukan unit penegakan hukum perikanan dan investasi terkait untuk memastikan pelaksanaan MCS yang efektif, dan; penerapan persyaratan sistem pemantauan kapal (VMS) wajib untuk kapal yang menangkap ikan di wilayah perairan Ghana dan kapal berbendera Ghana yang menangkap ikan di wilayah perairan luar.

Namun, setelah pencabutan kartu kuning, kekhawatiran terkait penerapan kebijakan dalam menangani praktik *IUU fishing* serta kelebihan kapasitas kapal pukat sektor industri kembali hadir. Walaupun Undang-Undang Perikanan (Amandemen) 880 tahun 2014 telah memperkenalkan rezim sanksi untuk mencegah pelanggaran terkait perikanan dengan denda minimum US\$1 juta, dalam praktiknya hukum tersebut jarang diterapkan. Hal tersebut terlihat dari denda yang seringkali dikenakan jauh di bawah minimum undang-undang melalui proses penyelesaian di pengadilan yang tidak jelas (Eriksen, Akpalu, & Vondolia, 2018) atau, dalam beberapa kasus, tidak dibayar sama sekali (EJF, 2018a).

Masalah yang terjadi pada sektor perikanan Ghana diperparah dengan kekurangan transparansi yang memungkinkan para operator ilegal melanggar hukum untuk menghindari deteksi dan sanksi. Akibatnya, praktik *IUU fishing* kembali marak terjadi dan kelebihan kapasitas armada penangkap ikan terus mengurangi stok ikan. Masalah-masalah yang terus terjadi membuat Komisi Eropa kembali memberikan kartu kuning peringatan kepada Ghana pada Juni 2021 dan menjadikan Ghana sebagai negara kedua di dunia yang diberikan kartu peringatan berulang (EJF, 2021b).

Dengan mengadopsi konsep *Transnational Advocacy Network* yang diusung oleh Keck dan Sikkink (1998), cara kerja *boomerang pattern* dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 3.1** *Boomerang Pattern* Upaya Memberantas Praktik Saiko



Sumber: diolah berdasarkan *boomerang pattern* dari Keck dan Sikkink (1998)

**Keterangan**

\*Rezim Internasional: ICCAT, UNCLOS, FAO Port State Measure Agreement.. (Selengkapnya dapat dilihat di TaylorCrabbe Initiative, 2019)

\*\*INGO: Environmental Justice Foundation (EJF)

\*\*\*IO: Uni Eropa

\*\*\*\*Media Internasional: *The Fish Site*, *The Guardian*, dan *The Maritime Executive*

### **3.3 Strategi Advokasi Transnasional Environmental Justice Foundation**

Tujuan dari advokasi transnasional adalah untuk menciptakan agenda, mempengaruhi diskursus, menarik perhatian publik terkait isu yang menjadi fokus advokasi, dan terlibat dalam perdebatan (seperti pembentukan narasi atau kontranarasi) tentang isu yang diadvokasi. Selain itu, advokasi transnasional juga dapat berupa mempengaruhi proses dan prosedur institusional (*procedure*), mempengaruhi perubahan kebijakan (*policy*), maupun mempengaruhi posisi aktor yang menjadi target sasaran advokasi (*behavior*) (M E Keck & Sikkink, 1998). Target sasaran dari advokasi transnasional sendiri dapat berupa negara, institusi regional maupun internasional, organisasi regional maupun internasional, atau korporasi. Sasaran tertinggi dari advokasi ialah perilaku negara. Oleh karena itu, indikator keberhasilan tertinggi dari advokasi dapat dilihat dari ketika advokasi yang dijalankan dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku negara (M E Keck & Sikkink, 1998).

Upaya EJF dalam mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana tentunya didasarkan pada strategi-strategi yang terencana dan sistematis, salah satunya adalah dengan memanfaatkan jaringan transnasional untuk melakukan kampanye. Menurut Myenzi (Parameswari, 2018), kampanye merupakan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan dengan memperjuangkan hak-hak kelompok marjunal melalui jalan identifikasi masalah, meningkatkan kesadaran masyarakat (khususnya para pembuat kebijakan), dan memobilisasi pendukung untuk beraksi sehingga tujuan

kampanye dapat diwujudkan. Konsep umum dari kampanye kemudian diturunkan menjadi kampanye advokasi yang dilakukan untuk memberi pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan oleh badan eksekutif maupun legislatif suatu negara.

Strategi kampanye advokasi pada umumnya dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu politik informasi (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), politik pengaruh (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*) (Parameswari, 2018). Para aktor dalam *transnational advocacy network* dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari sejumlah strategi advokasi (Kinanthi, 2018). Dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana, EJF menggunakan keseluruhan bentuk strategi advokasi.

### **3.3.1 Politik Informasi (*Information Politics*)**

Keck dan Sikkink (1999) mendefinisikan politik informasi sebagai “*the ability of non-traditional actors to mobilize information strategically to help create new issues and categories, and to persuade, pressurize, and gain leverage over much powerful organizations and government*” yang dengan kata lain dapat diartikan bahwa politik informasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh aktor internasional (non-tradisional) untuk memperoleh data baru yang belum tersentuh kemudian mengemasnya dan mendiseminasikannya secara global untuk meningkatkan daya tawarnya. Oleh karena itu, politik informasi

merupakan bentuk pemanfaatan analisis data riset sebagai dasar kampanye advokasi untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan kredibel yang berguna secara politik untuk mengarahkan advokasi sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap publik (Kinanthi, 2018).

Untuk memperoleh informasi, pada Maret dan April 2018, EJF menyelenggarakan forum konsultasi untuk mengumpulkan masukan dari komunitas nelayan guna meninjau kerangka hukum sektor perikanan Ghana. Konsultasi tersebut dilaksanakan dengan mengikutsertakan kurang lebih 273 nelayan serta 191 pengolah dan pedagang ikan yang dari 15 komunitas pesisir Ghana. Hasil konsultasi tersebut kemudian divalidasi oleh Kepala nelayan dan *Konkohemaa*<sup>6</sup> di Cape Coast pada bulan Mei 2018. Dalam validasi, Kepala nelayan dan *Konkohemaa* kemudian menyepakati sepuluh poin *communiqué*<sup>7</sup> yang merangkum poin-poin kunci konsensus antara lain seruan memberikan hukuman yang lebih tegas untuk pelaku penangkapan ikan yang menggunakan cahaya, bahan kimia, dan bahan peledak; perpanjangan Zona Eksklusif Pesisir yang dicadangkan untuk nelayan artisanal; konsultasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sektor perikanan; pemberdayaan masyarakat pesisir untuk menegakkan hukum di tingkat lokal; mitigasi dampak pengembangan minyak lepas

---

<sup>6</sup> *Konkohemaa* (Ratu Penjual Ikan) adalah wanita yang paling berpengaruh di lokasi penangkapan ikan. Secara tradisional, tugas dari *Konkohemaa* adalah untuk menawar harga ikan dengan nelayan dan menengahi masalah yang berkaitan dengan jual beli serta pengolahan ikan. Seorang *Konkohemaa* dipilih dengan mempertimbangkan pilihan para pemimpin (diantaranya Kepala nelayan, tetua, dan kepala keluarga) dan pencalonannya didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun dalam bisnis pemrosesan (EJF & Hen Mpoano, 2019a).

<sup>7</sup> *Communiqué* adalah pengumuman atau pernyataan resmi yang dibuat untuk disampaikan dan dipublikasikan oleh media.

pantai, dan; mengakhiri praktik Saiko (EJF & Hen Mpoano, 2018c). Untuk mengawali upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana, pada 5 Juni 2018, EJF merilis laporan berjudul “*The Problem with “Saiko”, An Ecological and Human Catastrophe*” yang berisi penjelasan tentang ancaman dari Saiko terhadap sektor perikanan artisanal Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018d). Sejak itu, EJF kemudian melanjutkan investigasi dan merilis sejumlah laporan yang berkaitan dengan sektor perikanan dan praktik Saiko di Ghana sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020.

EJF juga memanfaatkan proliferasi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan semakin mudahnya pertukaran informasi, maka pemerintah tidak dapat lagi memonopoli arus informasi dan tumbuhnya jaringan advokasi transnasional membantu melemahkan legitimasi kekuasaan yang tersentralisasi pada negara (Margaret E Keck & Sikkink, 1999; Singh dalam Soetjipto, 2018). Pada September 2018, EJF meluncurkan program radio bulanan pada saluran ATL 100.5 FM di Cape Coast. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan nelayan dan masyarakat umum tentang dampak penangkapan ikan ilegal, pentingnya perikanan skala kecil Ghana untuk ketahanan pangan dan pendapatan nasional, serta tantangan yang dihadapi komunitas nelayan dalam konteks penurunan stok ikan dan peningkatan persaingan. Dalam program radio tersebut dilaksanakan diskusi dengan melibatkan panelis dari komunitas nelayan, pemerintah, NGO, dan akademisi pada hari Senin pagi dan Selasa sore (EJF & Hen Mpoano, 2018d).

Selain itu, NGO di negara maju juga dapat memberikan pelatihan kepada NGO atau warga domestik di negara berkembang guna meningkatkan kapasitasnya dalam memperoleh dan mendokumentasikan informasi secara sistematis dan terperinci sehingga layak untuk dijadikan landasan dalam advokasi isu-isu strategis yang terjadi di wilayahnya (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dalam hal ini, sejak awal tahun 2018 EJF memberdayakan organisasi akar rumput dan para pemuda di Ghana melalui program hibah per triwulan (*quarterly grant programme*) yang menawarkan hibah hingga 2.500 Cedi Ghana kepada jurnalis untuk melaporkan masalah pada sektor perikanan Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018d). Artikel pertama yang membahas tentang praktik Saiko diterbitkan di portal berita *Citi FM* pada bulan Oktober 2018 yang membahas tentang konflik antara kapal pemasok minyak dengan nelayan skala kecil (Citi Newsroom, 2018) dan di portal berita *Daily Graphic* pada November 2018 yang membahas tentang dampak negatif dari praktik Saiko terhadap komunitas nelayan skala kecil (Daily Graphic, 2018). Pemberitaan terkait praktik Saiko di Ghana berlanjut dengan dirilisnya artikel berjudul “*Mending Ghana’s Fishing Net with Transparency*” di portal berita *Classic Ghana* pada Januari 2019 dan “*Paradox at Sea; More Trawlers on Ghana’s Waters as Stocks Dwindle*” di portal berita *Daily Graphic* pada Juni 2019 yang berfokus pada isu transparansi dalam sektor perikanan dan aktifitas para kapal pukat industri (Classic Ghana, 2019; Daily Graphic, 2018).

Pada Februari 2020 lalu, EJF juga melibatkan 17 editor dan jurnalis senior untuk membantu mendorong agenda mengakhiri praktik Saiko dalam pertemuan yang membahas tentang isu dan strategi untuk menghentikan praktik Saiko di Ghana (dapat dilihat pada Gambar 3.2). Pertemuan tersebut dinilai dapat membantu menyediakan wadah yang diperlukan untuk melibatkan konsumen dan memperkuat keterlibatan di berbagai tingkatan. Setelah diadakan pertemuan, sebuah reportase penting menjadi bentuk luaran dari pertemuan dengan Kodi Agbogah, direktur utama Hen Mpoano, yang hadir pada acara UpFront pada saluran Joy News TV untuk berdiskusi setelah pemutaran film dokumenter *Stolen at Sea* (EJF & Hen Mpoano, 2021a).

**Gambar 3.2** Pertemuan antara EJF dengan Editor dan Jurnalis Senior di Accra



Sumber: EJF & Hen Mpoano (2020)

Pemanfaatan media oleh EJF dalam mengumpulkan, menghasilkan, dan menyebarkan informasi terkait praktik Saiko di Ghana memperkuat posisi dan peran media yang penting sebagai mitra dalam politik informasi. Keck dan Sikkink (1999) juga menambahkan bahwa untuk menarik perhatian media internasional, terutama yang memiliki pengaruh, maka kelompok advokasi transnasional perlu memiliki hubungan dengan jurnalis yang bersimpati dengan kasus yang diadvokasikan, memiliki reputasi yang dapat dipercaya di mata jurnalis, dan kelompok advokasi transnasional hendaknya mampu mengemas informasi secara tepat waktu dan dramatis.

Berkaitan dengan syarat yang pertama, EJF sendiri memiliki hubungan dengan wartawan The Guardian, Kate Hondal, yang berafiliasi dengan organisasi Humanity United yang merupakan mitra dari EJF dalam advokasi isu perbudakan modern pada tahun 2014 lalu. Setelah sebelumnya menerbitkan sebuah paparan terkait perbudakan modern yang terjadi pada industri makanan laut (*seafood*) di Thailand pada koran *The Guardian*, Kate Hondal kembali memberitakan isu praktik Saiko di Ghana pada portal berita The Guardian dengan judul artikel “*Illegal Fishing by Foreign Trawlers Costs Ghana \$50 M a Year, Researchers Say*” (dapat dilihat pada Gambar 3.3) (The Guardian, 2019) menyusul perilsan laporan EJF dan Hen Mpoano yang berjudul “*Securing Equitable and Sustainable Fisheries: The Case for Greater Transparency in the Management and Governance of Ghana’s Fisheries Sector*”.

Gambar 3.3 Publikasi Situs Berita The Guardian



Sumber: The Guardian (2019)

### 3.3.2 Politik Simbolik (*Symbolic Politics*)

Politik simbolik merupakan upaya pembingkaihan (*framing*) isu dengan bahasa yang lebih umum dan populer sehingga dapat dipahami oleh publik secara luas dan berimplikasi pada menarik lebih banyak pihak untuk mendukung posisi aktor *transnational advocacy network* dalam upaya advokasinya (Margaret E Keck & Sikkink, 1998). *Framing* penting karena hal tersebut layaknya sebuah bingkai pada karya seni yang memberikan fokus kepada elemen tertentu dan mengesampingkan elemen lain yang dianggap kurang relevan (Allan & Hadden, 2017). Dalam hal ini, EJF memfokuskan advokasinya pada praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” yang marak terjadi meskipun masih terdapat sejumlah permasalahan lainnya seperti kehidupan komunitas pesisir yang tidak

sejahtera, kurangnya penegakan hukum perikanan yang tegas, serta meningkatnya ketidaksetaraan, ketidakpastian dalam ketersediaan stok ikan, dan pengelolaan perikanan yang tidak berkelanjutan pada sektor perikanan Ghana (Bennett et al., 2001; Hasselberg et al., 2020; Mensah & Antwi, 2002).

Dalam advokasinya, aktor dalam *transnational advocacy network* harus mampu meyakinkan media, aktor target, serta aktor berpengaruh lainnya yang dapat memberikan rasionalisasi bahwa dengan terlibat dalam aksi kolektif, maka perubahan yang lebih baik dapat diwujudkan (“*call to arms*”). Oleh karena itu, dalam advokasi perlu memilih penggunaan istilah seperti *severity*, *efficacy*, *urgency*, dan *propriety* sehingga dapat meyakinkan para pengikut maupun aktor lainnya untuk ikut terlibat dalam aksi kolektif (Benford & Snow, 2000). Untuk membingkai isu agar memiliki elemen *severity* (kekejaman) dilakukan dengan menampilkan cerita dengan penggunaan bahasa yang emosional (Mende, 2019). Pada laman depan situs resminya, EJF menampilkan pernyataan dari Ekuwa Kokuwa, salah satu penjual ikan di Ankafu, yang menyatakan “*Saiko has destroyed our ocean. It is worrying because the trawlers catch all the fishes meant to be caught by our husbands and use it for Saiko. Government must support coastal communities by stopping Saiko because we are really suffering*” (EJF, n.d.-b).

Pembingkaiian isu dalam politik simbolik juga dapat dilakukan dengan menyederhanakan isu melalui jargon atau slogan. Dalam

mengadvokasi isu Saiko, bersamaan dengan pemutaran film dokumenternya kepada komunitas-komunitas nelayan di Ghana, EJF turut menyebarkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran melalui kampanye dengan slogan #StopSaikoNow (EJF & Hen Mpoano, 2021b). Penggunaan slogan #StopSaikoNow ramai dilakukan oleh EJF dan Hen Mpoano bersama dengan sejumlah organisasi lainnya seperti GNCFC, Friends of the Nation, dan Oxfam di media sosial seperti Facebook dan Twitter. Slogan tersebut memberikan kesan penegasan yang menekankan pada pentingnya menghentikan praktik Saiko di Ghana yang mengancam kesejahteraan nelayan maupun sektor perikanan Ghana.

### **3.3.3 Politik Pengaruh (*Leverage Politics*)**

Politik pengaruh dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor yang lebih kuat seperti pemerintah negara lain, organisasi internasional, maupun perusahaan multinasional dalam situasi tertentu ketika salah satu anggota jaringan tidak berkemampuan untuk memberikan pengaruh secara signifikan. Aktivistis dalam jaringan advokasi cenderung menaruh perhatiannya pada efektivitas politik yang seringkali dapat dilihat pada perubahan kebijakan oleh aktor targetnya dan untuk mencapainya. Oleh karena itu, aktor dalam *transnational advocacy network* perlu mempengaruhi aktor yang dianggap lebih kuat tersebut sehingga aktor *transnational advocacy network* yang dianggap lebih lemah dari aktor targetnya dapat memperoleh kekuatan yang jauh melampaui

kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik aktor targetnya secara langsung (M E Keck & Sikkink, 1998).

Implikasi yang diberikan dari politik pengaruh pun dibagi menjadi dua: pengaruh dari segi material dan dari segi moral (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Dari segi material, aktor dalam *transnational advocacy network* dapat melakukan lobi negara atau institusi yang sedang melakukan kegiatan ekonomi<sup>8</sup> dengan negara target agar bersedia untuk menghentikan kegiatan tersebut. Selain itu, dari segi moral melihat politik pengaruh sebagai kemampuan aktor *transnational advocacy network* untuk mempermalukan aktor target sehingga isu advokasi dapat menjadi sorotan komunitas internasional. Dengan menjadi sorotan, aktor target diharapkan dapat mengubah perilaku dan/atau kebijakannya. Hal tersebut disebut oleh Keck dan Sikkink (1998) sebagai '*mobilization of shame*'.

Dari segi material, politik pengaruh dilakukan EJF menuntut Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk meneliti secara rinci semua impor hasil laut Uni Eropa yang ada untuk membantu Ghana mengakhiri praktik Saiko serta meningkatkan transparansi dalam manajemen sektor perikananannya (EJF & Hen Mpoano, 2020a). Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan dirilisnya laporan EJF berjudul "*Europe – A Market for Illegal Seafood from West Africa: The Case of Ghana's Industrial Trawl Sector*" yang dipresentasikan di hadapan Market

---

<sup>8</sup> Kegiatan ekonomi yang dimaksud dapat berupa hubungan kerjasama perdagangan maupun negara atau institusi yang ingin dipengaruhi merupakan donor bagi negara target.

Advisory Council (MAC)<sup>9</sup> pada September 2020. MAC pun telah mengeluarkan serangkaian rekomendasi terkait isu tersebut dan memberikannya kepada Komisi Eropa pada awal tahun 2021 lalu (EJF & Hen Mpoano, 2021b). Dengan melibatkan Uni Eropa sebagai aktor yang dianggap lebih kuat, maka efektivitas politik kampanye yang dilakukan oleh EJF tentunya akan meningkat dengan adanya penjatuhan ‘hukuman’ bersifat material kepada pemerintah Ghana.

Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, EJF juga melakukan *mobilization of shame* dengan menyebarkan isu praktik Saiko melalui situs web dan film dokumenter yang diunggah ke YouTube sehingga memiliki jangkauan akses yang tentunya juga lebih luas. Film-film dokumenter tentang praktik Saiko yang diunggah oleh EJF pada kanal YouTube resminya berjudul “*Ghana: A Fishing Nation in Crisis*” dan “*Shining a Light: EJF’s Investigation into the Devastating Impacts of Illegal Saiko Fishing in Ghana*”. Penyebaran isu kepada audiens yang lebih luas dilakukan sebagai bentuk ironi yang bertujuan untuk menimbulkan ‘rasa malu’ pemerintah (Kinanthi, 2018) yang dalam hal ini mengacu pada pemerintah Ghana sebagai aktor target.

Dalam upaya meraih audiens pada ranah regional, film dokumenter tersebut ditampilkan di hadapan anggota The Fisheries Committee for the West Central Gulf of Guinea (FCWC) pada September 2019. Penayangan

---

<sup>9</sup> Market Advisory Council atau MAC merupakan badan penasihat *multi-stakeholder* yang mewakili semua tahapan dalam *value chain* makanan laut Uni Eropa.

film dokumenter juga dilakukan dalam Konferensi Perikanan dan Lingkungan Pesisir (Conference on Fisheries and the Coastal Environment / CFCE) kedua di Accra. Dalam kegiatan tersebut, isu Saiko menjadi pusat perhatian dalam konferensi yang dihadiri oleh kurang lebih 282 peserta dari lembaga penelitian, asosiasi industri dan sektor wisata, Kementerian Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD), Komisi Perikanan (FC), FCWC, Food and Agriculture Organization (FAO); lembaga pemerintah lainnya, masyarakat sipil, nelayan, penjual ikan, serta media (EJF & Hen Mpoano, 2020b).

EJF juga mengadakan dialog regional di Accra, Volta, dan wilayah Barat Ghana antara 19 sampai 24 Februari 2020 (dapat dilihat pada Gambar 3.4). Dialog tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Perikanan (FC), Dewan Kepala Daerah, Unit Penegakkan Perikanan (Fisheries Enforcement Unit / FEU), Dewan Nelayan Kano Nasional Ghana (GNCFC), Asosiasi Pengolah dan Pedagang Ikan Nasional (NAFPTA), Asosiasi Kapal Pukat Industri Ghana (GITA), Asosiasi Nelayan Pesisir Ghana (GIFA), Angkatan Laut, akademisi, nelayan artisanal, serta media. Dengan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), dialog regional yang diadakan membahas tentang isu-isu yang diangkat oleh komunitas nelayan dengan tujuan mendorong para pembuat kebijakan kunci untuk bergabung dalam advokasi mengakhiri praktik Saiko di Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2021a).

**Gambar 3.4** Dialog Regional dalam Advokasi Isu Saiko di Ghana



Sumber: EJF & Hen Mpoano (2021)

Selanjutnya, dari segi moral, *mobilization of shame* cenderung melahirkan adanya *mobilization of outrage* atau kemarahan dari para aktivis atau kadang-kadang individu tanpa latar belakang advokasi untuk mengancam dan menuntut pemberian hukuman kepada pelanggar. Timbulnya kemarahan yang berkaitan dengan aspek moral terlihat dari yang disampaikan oleh Nana Jojo Solomon<sup>10</sup>, “*Important management measures such as the closed season are being undermined by saiko, and it will destroy our fisheries if it is allowed to continue. We urge the president to turn his personal attention to this matter, to intensify enforcement action to hal this illegal activity which is destroying the livelihoods of local fishers in Ghana*” (EJF, 2020c).

---

<sup>10</sup> Nana Jojo Solomon merupakan sekretaris nasional Dewan Nelayan Kano Nasional Ghana (GNCF) (USAID, 2019).

Kemarahan dari para aktivis juga tertuang dalam sebuah terbuka dari GNCFC bersama dengan delapan NGO lainnya<sup>11</sup> yang menuntut Presiden Ghana untuk membantu mengakhiri praktik Saiko yang mendorong stok ikan Ghana menuju titik kehancuran dan membahayakan mata pencaharian dan ketahanan pangan Ghana (EJF, 2020a). Urgensi dari menghentikan praktik Saiko di Ghana pun disampaikan sebagai berikut.

*“If this menace is not urgently addressed and measures instituted to permanently eradicate it, the source of income for over 2.7 million Ghanaians will be lost ... The loss of jobs amongst the youth will contribute to the rise of social vices and crime within the fishing communities and our wider wider society ... We note, with urgency, that any hope of saving Ghana’s fisheries from collapse is contingent on ending the saiko menace without delay”* (GNCFC et al., 2020).

Adanya ‘hukuman’ yang diberikan baik dari segi material maupun segi moral tersebut diharapkan dapat mendesak pemerintah Ghana untuk mengatur ulang sektor perikananannya sehingga praktik Saiko yang marak terjadi dan membawa kerugian terhadap negaranya dapat dihentikan. Namun, perubahan kebijakan dan perbaikan dalam manajemen sektor perikanan Ghana tentu perlu menyesuaikan ketentuan dari negara tujuan ekspornya secara khusus maupun permintaan masyarakat global secara umum.

---

<sup>11</sup> Delapan NGO lainnya yang menjadi partisipan dalam Surat Terbuka antara lain Livestock and Fisheries Chamber, CERATH Development Organization, EJF, Hen Mpoano, CARE, Friends of the Nation, Oxfam, dan Centre for Maritime Law and Security (CEMLAWS) Africa.

### 3.3.4 Politik Akuntabilitas (*Accountability Politics*)

Politik akuntabilitas merupakan upaya untuk memastikan bahwa aktor target menjalankan dan mempertahankan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Ketika suatu advokasi telah mencapai titik ini, maka isu yang diadvokasikan telah berhasil mencapai tujuannya (Margaret E Keck & Sikkink, 1998). Oleh karena itu, politik akuntabilitas merupakan puncak tertinggi dalam upaya advokasi oleh aktor-aktor dalam *transnational advocacy network*. Dalam hal ini, politik akuntabilitas terlihat pada saat aktor target, yaitu pemerintah Ghana, bersedia untuk mengubah perilaku serta kebijakannya sesuai dengan standar yang menjadi dasar tuntutan dari EJF sebagai salah satu aktor dalam *transnational advocacy network* terkait isu praktik Saiko di Ghana.

Politik akuntabilitas perlu dilaksanakan oleh kelompok jejaring karena terdapat sebuah pepatah berbunyi '*talk is cheap*' yang dalam hal ini berarti aktor target bisa saja mengubah posisi diskursus untuk memberikan pengalihan terhadap perhatian publik dan aktor-aktor lainnya dalam *transnational advocacy network* (Margaret E Keck & Sikkink, 1999). Maka dari itu, aktor-aktor yang memiliki tuntutan dalam advokasi sebaiknya melakukan pengawasan terkait implementasi perubahan kebijakan dan/atau kebijakan baru oleh aktor target agar sesuai dengan norma atau nilai-nilai universal yang telah diupayakan dalam advokasi. Selain itu, *transnational advocacy network* juga harus mampu menekan aktor target untuk menandatangani dokumen komitmen yang dapat

dijadikan sebagai ‘senjata pengingat’ apabila aktor target tidak menjalankan perubahan seperti yang telah digaungkan agar komitmennya tidak hanya sekedar ucapan verbal semata (Parameswari, 2018).

EJF menjalankan politik akuntabilitas melalui perilsan “*The Ten Principles for Global Transparency*” yang berfokus pada menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan untuk menjaga keberlanjutan laut pada tahun 2018 lalu (EJF, 2019a). Tujuan dari dirilisnya 10 prinsip transparansi global disampaikan oleh Steve Trent selaku Direktur Eksekutif EJF melalui pernyataan sebagai berikut.

*“The wide spread of these ten basic principles would transform the global seafood production sector and allow both governments and businesses to secure legal, sustainable, and ethical seafood, eradicating most illegal fishing and the most serious human rights abuses”* (EJF, 2019a).

Secara garis besar, 10 prinsip transparansi global dalam industri perikanan yang dirilis oleh EJF (EJF, 2019a) memberikan rekomendasi kebijakan bahwa semua negara harus:

1. Memberikan nomor unik kepada semua kapal;
2. Membuat data pelacakan kapal dapat diakses oleh publik;
3. Mempublikasikan daftar izin dan otorisasi penangkapan ikan;
4. Mempublikasikan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan dalam sektor perikanan;
5. Melarang pemindahan ikan antar kapal di laut tanpa izin dan memantau pemindahan ikan dengan cermat;

6. Mengatur basis data (*database*) digital informasi kapal;
7. Menghentikan penggunaan bendera kemudahan<sup>12</sup> (*flags of convenience*) bagi kapal penangkap ikan;
8. Mempublikasikan rincian pemilik kapal dan pembawa angkutan kapal;
9. Menjatuhkan hukuman kepada siapapun yang terlibat dalam penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (*IUU fishing*), serta;
10. Mengadopsi langkah-langkah internasional yang menetapkan standar jelas bagi kapal penangkap ikan dan perdagangan produk perikanan.

Sebelumnya, 10 prinsip transparansi global tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah Thailand sebagai hasil advokasi EJF terkait itu perbudakan modern di industri perikanannya. Selain itu, terhitung sejak tahun 2014, EJF telah secara rutin mempublikasikan status implementasi rekomendasi EJF terhadap pemerintah Thailand. Status implementasi terakhir dirilis dengan judul “*Implementation Status of EJF Recommendations to the Royal Thai Government*” pada tahun 2019 lalu (EJF, 2019a). Guna mewujudkan keberhasilan akan advokasi yang dilakukan terkait isu praktik Saiko di Ghana, EJF pun berharap pemerintah Ghana, sebagai aktor target, dapat turut mengimplementasi prinsip-prinsip yang menjadi rekomendasi EJF dalam rangka mewujudkan sektor

---

<sup>12</sup> Bendera kemudahan atau *flags of convenience* merupakan bendera negara tempat kapal terdaftar untuk menghindari biaya keuangan atau peraturan yang membatasi di negara pemilik sumber daya laut.

perikanan Ghana yang berkelanjutan dan terbebas dari isu penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi.

Di samping itu, ketidakmampuan Ghana untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal dapat memberikan ancaman kehilangan tujuan ekspor utamanya, yaitu negara-negara Uni Eropa. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya jaringan yang dimiliki oleh EJF dengan Uni Eropa membuat EJF dapat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa, salah satunya adalah untuk memboikot impor komoditas hasil laut (*seafood*) dari Ghana dengan memberikan kartu kuning atau bahkan kartu merah melalui skema *the carding process*. Dengan demikian, guna menghindari kehilangan salah satu importir terbesar hasil lautnya, maka pemerintah Ghana harus dapat mengambil tindakan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti atau serupa yang tertulis dalam *The Ten Principles for Global Transparency*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan terkait strategi untuk memberikan tekanan kepada aktor target dalam konsep *Transnational Advocacy Network* dan upaya mengangkat isu pada ranah regional dan global yang dilakukan oleh EJF dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, maka strategi dan bentuk pelaksanaan strategi yang dilakukan dapat dirangkum seperti pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Strategi Advokasi Transnasional EJJ**

No.	Strategi	Bentuk Pelaksanaan
1	Politik Informasi ( <i>Information Politics</i> )	1. Merilis laporan investigasi; 2. Meluncurkan program siaran radio bulanan; 3. Memberikan pelatihan jurnalistik, dan; 4. Mengadakan forum dialog.
2	Politik Simbolik ( <i>Symbolic Politics</i> )	1. Menggunakan jargon atau slogan #StopSaikoNow di sosial media Facebook dan Twitter.
3	Politik Pengaruh ( <i>Leverage Politics</i> )	1. Lobi dengan Komisi Eropa; 2. Mempresentasikan laporan hasil investigasi di hadapan Market Advisory Council (MAC); 3. Menayangkan film dokumenter; 4. Mengadakan dialog regional, dan; 5. Membuat surat terbuka kepada pemerintah Ghana.
4	Politik Akuntabilitas ( <i>Accountability Politics</i> )	1. Merilis <i>The Ten Principles for Global Transparency</i> .

Sumber: diolah oleh penulis

### **3.4 Strategi Environmental Justice Foundation pada Ranah Domestik Ghana**

Selain memanfaatkan kekuatan informasi dan pengaruh dalam advokasi transnasionalnya, EJJ juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu memberantas praktik Saiko di Ghana. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan yang dilakukan oleh EJJ atas aktivitas kapal penangkap ikan di wilayah perairan Ghana dan kapal berbendera Ghana. Pengamatan tersebut dilakukan dengan menggunakan

sebuah perangkat lunak bernama ExactEarth, yaitu sistem pelacakan berbasis satelit yang dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System / AIS*). Sebagai hasil dari pengamatan tersebut, sejumlah pemberitahuan telah dikirim kepada otoritas perikanan di Ghana dan negara tetangganya, Pantai Gading, untuk penyelidikan dan tindak lanjut (EJF & Hen Mpoano, 2018b).

Tidak hanya itu, pada Maret 2018 EJF juga memulai pengembangan aplikasi seluler yang bertujuan untuk menyediakan sarana sederhana dan ramah pengguna bagi para nelayan untuk merekam informasi terkait penangkapan ikan ilegal dan perambahan oleh kapal industri yang mereka saksikan di wilayah perairan Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2018c). Data yang dilaporkan diberikan label geografis dan dikirimkan ke basis data pusat sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat tumpang tindih dan konflik antara kapal penangkap ikan skala kecil dengan kapal industri, memberikan bukti tuntutan atas kasus individu penangkapan ikan ilegal, serta membantu nelayan mendapatkan ganti rugi apabila diperlukan (EJF & Hen Mpoano, 2018b).

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama periode uji coba aplikasi, EJF memberikan alternatif kepada para nelayan untuk menggunakan aplikasi siap pakai bernama “Collect” yang dikembangkan oleh Atlan/Social Cops untuk pengumpulan data di berbagai wilayah terpencil. Penggunaan aplikasi tersebut disesuaikan dengan konteks perikanan di Ghana dengan menyediakan survei khusus

yang memungkinkan para nelayan untuk mengirimkan gambar, informasi lokasi yang tepat, serta rekaman laporan dalam beberapa langkah sederhana (EJF & Hen Mpoano, 2020b).

Pada penghujung pelaksanaan proyek *Far Dwuma Nkodo*, EJF meluncurkan aplikasi seluler bernama “DASE” yang berarti “bukti” dalam bahasa Fante yang memungkinkan para nelayan untuk mengumpulkan bukti penangkapan ikan ilegal kepada Divisi Pengawasan (Monitoring, Control, and Surveillance Division / MCS) Komisi Perikanan. Melalui kerjasama dengan Komisi Perikanan pula, EJF telah melibatkan lebih dari 700 nelayan dari 48 komunitas di Wilayah Tengah Ghana dalam pelatihan penggunaan aplikasi dan pengumpulan bukti yang kuat sehingga dapat ditindaklanjuti. EJF juga telah memberikan pelatihan kepada GNCFC dan asosiasi perwakilan nelayan skala kecil tentang cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh nelayan dan langkah menindaklanjuti tindakan penegakan hukum (EJF & Hen Mpoano, 2021b).

Sampai dengan Desember 2020, sejumlah lebih dari 100 nelayan di Ghana telah menggunakan aplikasi DASE dan lebih dari 50 laporan pelanggaran telah diterima. Pelanggaran yang dilaporkan termasuk praktik Saiko yang dilakukan oleh kapal industri di zona yang diperuntukkan kepada nelayan skala kecil. Bukti-bukti tersebut juga telah diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindak lebih lanjut (EJF & Hen Mpoano, 2021b).

### **3.5 Implikasi Strategi Environmental Justice Foundation terhadap Praktik “Saiko” dan Sektor Perikanan Ghana**

Langkah-langkah kampanye advokasi yang dilakukan oleh EJF dalam upaya memberikan tekanan memaksa pemerintah Ghana untuk mengubah perilaku serta kebijakannya terkait sektor perikanan. Hal tersebut terlihat menyusul perilisan laporan EJF berjudul “*Securing Equitable and Sustainable Fisheries: The Case for Greater Transparency in the Management and Governance of Ghana’s Fisheries Sector*” yang mengungkap bahwa industri perikanan Ghana menderita karena kurangnya transparansi sehingga memungkinkan para pelaku penangkapan ikan ilegal untuk menyamarkan identitas, kepemilikan, dan sejarah kapal penangkap ikan untuk menghindari deteksi serta sanksi (EJF & Hen Mpoano, 2019b).

Pemerintah Ghana juga telah menunjukkan kesediaannya untuk berkomitmen pada upaya memberantas praktik Saiko pada penyelenggaraan Conference on Fisheries and the Coastal Environment pada Agustus 2019 lalu, yang mana Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD) Ghana menyebutkan bahwa pemberantasan tersebut merupakan prioritas utama pemerintah untuk memastikan pemulihan stok ikan dan keberlanjutan sektor perikanan Ghana (EJF, 2019c; EJF & Hen Mpoano, 2019b). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah Ghana mengeluarkan kebijakan penerapan musim tertutup<sup>13</sup> tertanggal 15 Mei sampai dengan 15 Juni 2019 untuk semua armada (kecuali armada

---

<sup>13</sup> Musim tertutup atau *closed season* merupakan kebijakan yang menentukan periode yang mana perburuan atau penangkapan jenis hewan tertentu, seperti burung atau ikan, tidak diperbolehkan (Apetorgbor, 2018).

tuna yang diatur secara terpisah) untuk melindungi induk ikan yang sedang berkembang biak (MoFAD, 2019).

Dengan diterapkannya musim tertutup dan diupayakannya pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal, maka stok ‘Ikan Rakyat’ diharapkan dapat pulih dan jumlah stok ikan dalam pendaratan dapat meningkat (MoFAD, 2019). Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kemungkinan ikan untuk bereproduksi, menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi ikan remaja untuk tumbuh, dan pada akhirnya menjaga proses reproduksi ikan (MoFAD, 2019). Urgensi penerapan kebijakan musim tertutup oleh pemerintah Ghana disampaikan oleh Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD), Elizabeth Afoley-Quaye, yang menyatakan:

*“The marine and fresh water bodies of Ghana are well endowed with fishery resources and if properly managed shall provide sustainable economic opportunities for the country. The fishery resources have been the economic backbone of the many fishing communities for centuries, especially artisanal fishermen, fish processors and it is expected to remain so provided the resources are sustainably managed”* (MoFAD, 2019).

Penerapan musim tertutup oleh pemerintah Ghana membantu memberikan penurunan yang signifikan pada aktivitas Saiko di Elmina, tempat pendaratan utama ikan hasil praktik Saiko di wilayah pusat Ghana. Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah Ghana jelas berfungsi secara efektif dalam menghentikan praktik Saiko. Namun, penurunan tersebut tidak berlangsung untuk waktu yang lama.

Melalui pemantauan yang dilakukan oleh EJF menunjukkan bahwa aktifitas Saiko kembali meningkat di Elmina hanya beberapa bulan kemudian (EJF, 2019e).

Kembali maraknya praktik Saiko menandakan belum adanya akhir dari perjuangan EJF untuk memberantas praktik Saiko di Ghana. Pada dialog regional di sejumlah wilayah Ghana pada tahun 2020 lalu, EJF berhasil meningkatkan kesadaran para partisipan yang hadir terkait pentingnya mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk memberantas praktik Saiko. Dari dialog regional tersebut, para partisipan menyatakan keprihatinan terkait kurangnya penegakan hukum perikanan dan mendesak Kementerian Perikanan dan Pengembangan Budidaya (MoFAD) untuk tidak memberikan izin kepada kapal penangkap ikan yang melanggar hukum, melakukan pemeriksaan alat tangkap secara rutin sebelum kapal memulai ekspedisi penangkapan ikan, menyediakan sumber daya Unit Penegakan Perikanan (Fisheries Enforcement Unit / FEU) dan Polisi Laut, serta menindaklanjuti laporan pemantau perikanan tentang kegiatan kapal penangkap ikan. Selain itu, melalui dialog regional tersebut para partisipan juga mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa campur tangan politi, terutama dalam menghukum para pelakunya (EJF & Hen Mpoano, 2021a).

Kampanye advokasi yang dilakukan oleh EJF pun turut mendapat dukungan dari pihak Uni Eropa. Pada Oktober 2020, Delegasi Uni Eropa kepada Ghana, Robert Schiliro, melakukan kunjungan ke Ghana untuk

menilai kemajuan pekerjaan saat proyek *Far Dwuma Nkodo* hampir selesai (dapat dilihat pada Gambar 3.5). Dalam sebuah wawancara dengan media, Robert Schiliro menyampaikan permintaannya kepada warga Ghana untuk bergabung dalam perang melawan praktik Saiko untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan negara. Selain itu, Robert Schiliro juga memberikan penekanan bahwa *“it is important that Ghanaian society as well as Ghanaian business join in the fight”* dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana (EJF & Hen Mpoano, 2021b).

**Gambar 3.5** Kunjungan Delegasi Uni Eropa kepada Ghana



Sumber: EJF & Hen Mpoano (2021b)

Tidak hanya itu, dalam upaya memberantas praktik Saiko, Robert Schiliro sebagai Delegasi Uni Eropa kepada Ghana juga menjanjikan komitmen Uni Eropa untuk turut membantu dalam mengakhiri praktik penangkapan ikan ilegal dalam segala bentuk. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan sebagai berikut (Ghana Business News, 2020).

*“I can tell you that the EU is ready to take all the measures, which are in our capability to be taken for the perpetrators of this illegality. We will do all that is necessary from the very top of our administration to end saiko”* (Ghana Business News, 2020).

Meskipun telah diserukan tuntutan dari masyarakat lokal maupun global dan diberikan bantuan Uni Eropa dalam upaya memberantas praktik Saiko, pemerintah Ghana tetap dianggap gagal dalam menangani isu tersebut. Oleh karena itu, pada akhirnya Uni Eropa memberikan peringatan yang tegas kepada Ghana melalui pemberian kartu kuning peringatan kedua pada Juni 2021 lalu (European Commission, 2021). Keputusan pemberian kartu kuning didasarkan pada ketidakmampuan Ghana untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir, atau pasar (European Commission, 2021). Pemberian kartu kuning tersebut diberikan sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi Ghana untuk bereaksi dan mengambil tindakan yang berarti guna memperbaiki situasi. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Lingkungan, Kelautan, dan Perikanan Komisi Eropa, Virginijus Sinkevičius yang menyatakan:

*“The Commission stands for zero tolerance for IUU fishing. Ghana plays an important role in fisheries governance in West Africa. Therefore, we stand ready to work with Ghana to address the threats IUU fishing poses to the sustainability of fish stocks, coastal communities, food security, and the profits of those fishermen – and women who follow the rules. Sustainable fisheries is key to better ocean governance”* (European Commission, 2021).

Menanggapi pemberian kartu kuning peringatan kedua dari Uni Eropa, Menteri Perikanan dan Pengembangan Budidaya Ghana saat ini,

Mavis Hawa Koomson, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kembali undang-undang dan kebijakan yang mengatur sektor perikanan. Rancangan undang-undang perikanan yang baru pun juga sedang disusun untuk menggantikan undang-undang perikanan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan Ghana memenuhi tuntutan yang ada dalam pengelolaan perikanan dan praktik terbaik internasional. Selain itu, pemerintah Ghana juga berniat untuk meninjau Kebijakan Perikanan dan Budidaya Nasional yang dikembangkan pada tahun 2008 lalu (MyJoyOnline, 2021).

Pemerintah Ghana juga mengambil langkah-langkah nyata melalui perolehan 4 (empat) kapal patroli yang akan dikerahkan pada empat wilayah pesisir antara lain Accra, Volta, dan wilayah Barat Ghana untuk mendukung inspeksi laut secara rutin. Selain itu, pemerintah Ghana juga akan mengerahkan kapal penelitian guna melakukan penelitian ilmiah terhadap sektor perikanan secara teratur (SeafoodSource, 2021). Peninjauan undang-undang perikanan dan akuisisi kapal patroli merupakan beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Ghana untuk memastikan bahwa ekosistem perikanan Ghana tetap hidup dan produktif sehingga dapat mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan yang terbebas dari bahaya praktik Saiko.

Berdasarkan penjelasan di atas (termasuk penjelasan pada subbab 3.2 dan 3.3), maka mekanisme *boomerang pattern* yang diterapkan oleh

EJF dalam upaya menghentikan praktik Saiko di Ghana dapat dikatakan telah bekerja dengan baik. Hal tersebut terlihat dari serangkaian tekanan yang diterima oleh pemerintah Ghana menyusul kampanye global yang dilakukan oleh EJF pada tingkat global dan Hen Mpoano pada tingkat lokal. Sebelumnya, Hen Mpoano sebagai organisasi domestik berusaha untuk melakukan advokasi domestik tanpa melibatkan aktor luar, namun hasilnya adalah adanya limitasi dari pemerintah dan oleh karena itu, Hen Mpoano menjalin relasi dengan aktor non-negara di negara maju, yaitu EJF, karena dinilai memiliki sumber daya dan ruang advokasi yang lebih besar. Jaringan yang terbentuk oleh Hen Mpoano dan EJF kemudian berkembang dengan ikut terlibatnya aktor-aktor non-negara lainnya seperti media internasional. Fenomena tersebut disebut oleh Keck dan Sikkink (1999) sebagai “*networks produce networks*”. Pada akhirnya, advokasi yang dilakukan dengan melintasi batas negara berhasil menyerang pemerintah Ghana sebagai aktor target yang kemudian mengubah kebijakannya guna berupaya memberantas praktik Saiko dan mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan.